



## Tinjauan Perhitungan Dan Pelaporan Penyusutan Aset Tetap Menggunakan PSAP 07 Pada Sekertariat DPRD Kabupaten Karawang Tahun 2021

Dina Febriana<sup>1</sup>, Achmad Nawawi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Singaperbangsa Karawang

### Abstract

Received: 15 November 2023  
Revised: 13 Desember 2023  
Accepted: 15 Januari 2024

*Febriana, Dina. 2023. Review of Calculation and Reporting of Depreciation of Fixed Assets Using PSAP 07 at the Secretariat DPRD of the Karawang Regency in 2021. Final Report, Accounting Study Program, Singaperbangsa Karawang University. Supervisor: H. Achmad Nawawi, S.E., M.Si. Fixed assets are assets owned by an entity that can be used as an economic source in its operational activities. Fixed assets have physical characteristics and are recorded in the balance sheet as property and equipment assets. Fixed assets are types of assets that are subject to depreciation. Depreciation of fixed assets is the process of allocating the acquisition price of tangible fixed assets over the period that benefits from their use, this illustrates the wear and tear and also the level of depreciation when using these assets. This study aims to determine the calculation of depreciation of fixed assets carried out at the Secretariat DPRD of the Karawang Regency in 2021 and reporting of depreciation of fixed assets carried out at the Secretariat DPRD of the Karawang Regency in 2021. The data used in this study is primary data obtained directly from the object of research, namely Secretariat DPRD of the Karawang Regency. While secondary data is obtained in finished form that has been collected and processed by other parties and has been published. Based on the results of data analysis, referring to Karawang Regent Regulation No. 42 of 2019 that the implementation of the calculation of depreciation of fixed assets at the Secretariat DPRD of the Karawang Regency has used the straight-line method and the application of reporting of depreciation of fixed assets at the Secretariat DPRD of the Karawang Regency is in accordance with the statement stipulated in the PSP 07.*

**Keywords:** Fixed Assets, Depreciation of Fixed Assets, PSAP 07

(\*) Corresponding Author: [dinafebrianaa15@gmail.com](mailto:dinafebrianaa15@gmail.com)

**How to Cite:** Febriana, D., & Nawawi, A. (2024). Tinjauan Perhitungan Dan Pelaporan Penyusutan Aset Tetap Menggunakan PSAP 07 Pada Sekertariat DPRD Kabupaten Karawang Tahun 2021. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10521416>.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Aset biasanya berupa barang keuangan, komersial, atau nilai tukar milik organisasi, bisnis, atau individu. Aset hukum adalah hal-hal yang menjadi milik perusahaan, kemitraan, asosiasi bisnis, atau individu. Mereka bisa berwujud, tidak berwujud, bergerak, atau tidak bergerak. Bisnis adalah lembaga mutakhir dengan peran pasti untuk dimainkan dalam mencapai tujuan. Baik itu perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, maupun perusahaan dagang. Tujuan perusahaan, selain menghasilkan keuntungan, biasanya adalah pertumbuhan yang berkelanjutan, kelangsungan hidup, dan memberikan kesan yang baik kepada publik.

Perusahaan membutuhkan perlengkapan atau peralatan, salah satunya aset tetap, untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang semakin canggih. Karena dampaknya yang signifikan terhadap perusahaan, aset tetap merupakan kebutuhan untuk semua bisnis. Aset tetap berwujud adalah berbagai jenis kekayaan yang digunakan dalam jangka waktu panjang ataupun juga permanen dalam operasi reguler bisnis. Tanah, bangunan, mobil, mesin, dan perlengkapan kantor semuanya dianggap aset tetap.

Perusahaan memiliki tanah di bumi ini, yang digunakannya untuk menjalankan operasi bisnis regulernya. Bangunan kantor, fasilitas manufaktur, dan bangunan garasi adalah contoh bangunan di bawah kendali bisnis dan digunakan sehubungan dengan operasi rutin bisnis tersebut. Semua jenis alat transportasi yang dimiliki dan digunakan oleh bisnis untuk karyawan atau transportasi kargo dianggap sebagai bentuk transportasi yang berada di bawah kendalinya. Seluruh alat yang digunakan dalam pemrosesan benda yang terpaut dengan pembedahan bisnis reguler industri diketahui. Perangkat, perabot, dan perlengkapan kantor yang dikelola oleh perusahaan dan digunakan sehubungan dengan kegiatan tersebut disebut sebagai perlengkapan kantor.

Perusahaan harus membayar biaya, juga disebut sebagai harga perolehan, untuk membeli aset tetap. Harga perolehan mencakup semua biaya yang dikeluarkan hingga aset tetap dapat digunakan, termasuk utang apa pun. Biaya perolehan aset tetap tersebut untuk bisnis merupakan sumber nilai ekonomi, yang manfaatnya akan dirasakan secara bertahap (seiring waktu) dalam aktivitas penghasil pendapatan. Oleh karena itu, periode di mana pendapatan dari penggunaan aset tetap direalisasi diberikan sebagian dari anggaran akuisisi aset tetap. Karena aset tetap mempunyai kecenderungan buat terdepresiasi sepanjang masa ekonomisnya, hingga butuh buat mengalokasikan harga perolehan aset tersebut secara periodik. Penentuan harga beli aset tetap biaya-biaya yang dikeluarkan sepanjang masa manfaat aset tetap penyusutan aset tetap pelepasan aset tetap serta penyajian aset tetap dalam laporan posisi keuangan ialah tantangan utama dalam akuntansi aset tetap. Bisnis mempunyai bermacam opsi buat mendapatkan aset tetap tercantum pembelian tunai langsung, pembelian kredit ataupun cicilan, ubah tambah, hadiah, ataupun kontribusi.

Organisasi pemerintah yang menggunakan aset tetap harus memperhitungkannya. Dalam situasi ini, sangat penting untuk mempertimbangkan setiap identifikasi, estimasi, pengukuran, dan pengungkapan aset tetap karena mereka membantu menunjukkan seberapa adil lembaga telah melakukan akuntansinya. Itu harus mengikuti PSAP No. 07 agar konsisten dengan prinsip akuntansi standar yaitu tentang Akuntansi Aktiva Tetap. Pernyataan standar yang disebut PSAP 07, yang digunakan oleh seluruh organisasi pemerintah yang menerbitkan laporan keuangan, bertujuan buat mengendalikan gimana akuntansi aset tetap dicoba tercantum pengakuan, evaluasi penyediaan, serta pengungkapan.

Proses pendistribusian nilai aset tetap yang bisa disusutkan sepanjang masa manfaat aset tersebut diketahui dengan penyusutan. Buat tiap periode, nilai penyusutan dihitung dengan metode mengurangkan nilai aset tetap di neraca serta biaya penyusutan di laporan operasional. Dengan memakai beberapa tata cara yang

sistematis, nilai aset terus disesuaikan cocok dengan masa manfaatnya. Tata cara penyusutan wajib menampilkan keuntungan finansial ataupun kemampuan jasa yang hendak ditawarkan kepada pemerintah. Penyusutan buat periode berjalan serta berikutnya wajib disesuaikan bila ada penyimpangan yang signifikan dari ditaksir lebih dahulu atas masa manfaat aset tetap yang bisa disusutkan. Ini wajib dicoba secara tertib.

Dukungan administratif diberikan oleh sekretariat DPRD yang ialah salah satu komponen dari pelayanan tersebut. Sekretaris DPRD yang secara teknis berprofesi selaku kepala sekretariat serta secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati lewat Sekretaris Daerah secara operasional berkedudukan di dasar serta bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD. Sekretariat DPRD bertugas menanggulangi kesekretariatan serta administrasi keuangan, menunjang penerapan hak serta kewajiban DPRD, dan sediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD dalam melakukan tugas serta kewajibannya cocok dengan kebutuhan.

### **Rumusan Masalah**

Terdapat rumusan permasalahan yang akan dibahas bersumber pada latar balik tersebut di atas, ialah:

1. Bagaimana perhitungan penyusutan aset tetap yang dilakukan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang tahun 2021?
2. Bagaimana pelaporan penyusutan aset tetap yang dilakukan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang tahun 2021?

### **Batasan Masalah**

Perhitungan dan pelaporan penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus serta pelaporannya menyesuaikan dengan aturan yang terdapat pada PSAP 07 (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07) yang dilakukan di Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang dibahas dalam kajian batasan masalah.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari riset ini didasarkan pada bagaimana permasalahan itu diformulasikan di atas:

1. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan penyusutan aset tetap yang dilakukan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang tahun 2021.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaporan penyusutan aset tetap yang dilakukan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang tahun 2021.

### **Manfaat Penelitian**

#### **Manfaat Akademik**

Penemuan riset ini diharapkan bisa membagikan kontribusi yang signifikan terhadap teori-teori terkait penelitian. Hasil penelitian juga akan menjadi sumber ilmu bagi peneliti seperti ini.

Selaku salah satu ketentuan untuk mendapatkan gelar D3 Akuntansi di Universitas Singaperbangsa Karawang, diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai sumber informasi atau sebagai informasi untuk menambah pengetahuan dan gagasan bagi penulis dalam menyusun Tugas Akhir.

### **Manfaat Praktis**

Kajian ini dimaksudkan untuk membantu pimpinan Sekertariat DPRD Kabupaten Karawang membuat keputusan tentang kegiatan operasional.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Akuntansi**

#### **Pengertian Akuntansi**

Sujarweni (2016:1) mendefinisikan akuntansi selaku aktivitas mengumpulkan, meringkas, mengkategorikan, serta memberi tahu dalam wujud laporan keuangan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. Jadi bisa disimpulkan kalau akuntansi merupakan proses transaksi semacam yang ditunjukkan oleh faktur, setelah itu dari transaksi terbuat buku besar, serta lembar kerja yang hendak menciptakan data berbentuk laporan keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu guna keperluan akuntansi ini. Membuat data keuangan ada untuk pihak yang berkepentingan dalam wujud laporan keuangan merupakan tujuan dari akuntansi.

Sumarsan (2018:1) mendefinisikan akuntansi selaku seni mengumpulkan, mengenali, mengkategorikan, serta mendokumentasikan transaksi serta peristiwa keuangan buat menciptakan data keuangan ataupun laporan keuangan yang bisa digunakan oleh pihak yang berkepentingan.

Bersumber Sugiri serta Riyono (2018:1), akuntansi dipandang selaku kegiatan jasa yang bertujuan buat menyebarkan data kuantitatif, khususnya di industri keuangan. Diharapkan kalau data ini hendak diterapkan kala membuat keputusan keuangan yang sehat.

Akuntansi, bersumber Agie Hanggara (2019: 1), merupakan proses menciptakan mencatat, serta mengatakan informasi ataupun data keuangan yang bermanfaat buat evaluasi serta pengambilan keputusan.

Winwin Yadianti serta Ilham Wahyudin (2020:6-7) Akuntansi merupakan sistem data yang mengenali mendokumentasikan, serta memberitahukan pihak-pihak yang berkepentingan atas transaksi keuangan sesuatu organisasi.

Agar lembaga yang berkepentingan, seperti organisasi atau entitas, menggunakan data atau transaksi keuangan untuk pengambilan keputusan atau tujuan lain, data tersebut harus diproses, dicatat, diklasifikasikan, dan disajikan. Ini adalah proses akuntansi.

#### **Pihak-pihak Pengguna Informasi Akuntansi**

1. Pihak Intern merupakan pihak yang ikut serta pada saat pembuatan laporan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Pihak intern meliputi :
  - a) Para Pemilik atau Komisaris,
  - b) Manajemen,
  - c) Para karyawan dan buruh.
2. Pihak Extern merupakan pihak luar perusahaan yang menggunakan informasi akuntansi untuk dapat melakukan pengambilan keputusan. Pihak Ekstern meliputi:
  - a) Pajak,
  - b) Konsultan,

c) Kreditur.

### **Akuntansi Pemerintahan**

#### **Pengertian Akuntansi Pemerintahan**

Akuntansi pemerintahan merupakan akuntansi yang sudah diresmikan di bidang keuangan negeri (Keuangan Publik), serta terdiri dari tahapan mengenali mengevaluasi, mencatat, serta memberi tahu transaksi keuangan dari sesuatu daerah ataupun kabupaten yang digunakan selaku informasi buat menginformasikan keputusan selaku data ekonomi oleh mereka yang membutuhkannya.

Hasanah serta Fauzi (2017:1) mendefinisikan akuntansi pemerintahan selaku sesuatu aktivitas yang menawarkan jasa penciptaan data keuangan publik bersumber pada prosedur pengumpulan, pengkategorian, pengikhtisaran, serta interpretasi data keuangan.

Bersumber Pramudiana (2017), akuntansi pemerintahan merupakan proses menggambarkan, mendokumentasikan, mengukur, mengklasifikasikan, serta meringkas hasil dari proses yang dicoba oleh pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun daerah menyajikan transaksi keuangan, diiringi dengan laporan serta analisis penemuan.

Sebaliknya Akuntansi Pemerintahan didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 selaku proses pengidentifikasian, pencatatan, serta pelaporan keuangan di area pemerintahan. Data ini bisa berguna untuk pengguna akuntansi, semacam lembaga pemerintah serta organisasi pemerintah.

Dalam penataan serta pengembangan akuntansi pemerintahan, ada kerangka konseptual yang jadi landasan untuk formulasi sesuatu perihal yang mendasarinya. Selaku bagian dari kerangka konseptual, laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, akuntansi persediaan, akuntansi investasi, akuntansi aset tetap akuntansi konstruksi dalam proses, akuntansi kewajiban, laporan keuangan konsolidasi, serta laporan operasional disajikan.

### **Laporan Keuangan Pemerintahan**

#### **Pengertian Laporan Keuangan Pemerintahan**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 laporan keuangan pemerintah merupakan laporan terstruktur tentang kesehatan keuangan serta transaksi unit pelaporan. Yang diartikan dengan "entitas pelapor" merupakan entitas pemerintah yang terdiri dari satu ataupun lebih entitas akuntansi yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan buat mengutarakan laporan pertanggungjawaban berbentuk laporan keuangan umum yang meliputi:

1. Pemerintah pusat,
2. Dalam pemerintahan nasional, setiap kementerian negara atau organisasi,
3. Pemerintah daerah, serta
4. Salah satu departemen pemerintah pusat maupun daerah.

#### **Peranan Pelaporan Keuangan pemerintahan**

Laporan keuangan pemerintah disusun serta disusun sedemikian rupa sehingga bisa serta bisa menyajikan data yang sangat relevan menimpa posisi keuangan serta transaksi keuangan yang terjalin. Nilai sumber energi ekonomi yang digunakan buat melakukan pembedahan pemerintah ialah aspek berarti yang lain

yang menolong kita menguasai laporan keuangan, serta pula berarti buat evaluasi suasana keadaan keuangan yang akurat serta efektif. Tiap organisasi ataupun lembaga pemerintah harus memberi tahu seluruh suatu yang sudah dicoba serta hasil yang sudah dicapai sepanjang penerapan aktivitas secara sistematis serta terstruktur dalam satu periode pelaporan.

### **Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah**

Konsumen laporan keuangan bisa menciptakan data yang bermanfaat dalam pelaporan keuangan pemerintah. Tujuan pelaporan keuangan merupakan selaku berikut:

1. Dapat menyajikan data perihal posisi keuangan,
2. Dapat menyajikan informasi perihal Realisasi Anggaran,
3. Dapat menyajikan informasi perihal saldo anggaran lebih,
4. Dapat menyajikan informasi perihal arus kas,
5. Dapat menyajikan informasi perihal tentang hasil operasi dan perubahan pada ekuitas dalam suatu entitas.

### **Aset Tetap**

#### **Pengertian Aset tetap**

Aset tetap adalah barang milik suatu organisasi atau badan, berwujud, dan mempunyai masa manfaat paling sedikit 12 (dua belas) bulan agar dapat digunakan dalam kegiatan operasionalnya. Karena aset tetap dapat membantu operasi entitas atau organisasi mencapai tujuan masa depan, mereka memainkan peran penting dalam entitas atau organisasi.

Aset tetap merupakan benda kepunyaan sesuatu organisasi ataupun tubuh berwujud, serta memiliki masa manfaat sangat sedikit 12 (dua belas) bulan supaya bisa digunakan dalam aktivitas operasionalnya. Sebab aset tetap bisa menolong pembedahan entitas ataupun organisasi menggapai tujuan masa depan, mereka memainkan kedudukan berarti dalam entitas ataupun organisasi.

Aset tetap tercantum dalam neraca yang dilaporkan manajemen secara teratur ataupun tahunan, bersumber Waluyo (2020: 107). Sepanjang ini berlangsung, PSAP Nomor Aset tetap merupakan harta barang yang digunakan baik oleh warga ataupun oleh pemerintah serta memiliki masa manfaat sangat sedikit satu tahun.

Bersumber Hery (2014:121), aset tetap merupakan aset yang keberadaannya bisa diamati secara raga relatif permanen, serta mempunyai usia murah yang panjang. Aset yang bisa dijamah bertabiat berwujud. Tidak semacam aset tidak berwujud, yang tidak mempunyai wujud raga serta ialah hasil konvensi sosial, ekonomi, ataupun hukum.

#### **Klasifikasi Aset tetap**

Berdasarkan PSAP No. 07 Aset tetap termasuk dalam kategori sebagai berikut:

1. Tanah

Tanah merupakan aset tetap yang bisa dibeli baik dalam kondisi siap gunakan ataupun dengan maksud digunakan demi keperluan operasional pemerintahan.

2. Peralatan serta Mesin

Aset tetap dengan masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap ini bisa berupa perlengkapan kantor, kendaraan bermotor, atau mobil mahal.

3. Gedung dan bangunan  
Merupakan jenis aset tetap yang mencakup seluruh bangunan serta struktur yang dibeli dengan maksud digunakan untuk aktivitas operasional pemerintah serta pula dalam kondisi bisa digunakan.
4. Irigasi, Jalan serta Jaringan  
Ialah aset yang dibentuk oleh pemerintah yang dipunyai pula oleh pemerintah dalam keadaan siap gunakan.
5. Aset tetap lainnya.  
Tercantum aset yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh buat digunakan dalam aktivitas operasional pemerintah.

#### **Pengakuan Aset tetap**

Teknik untuk mengidentifikasi aset yang dianggap sebagai aset tetap disebut pengakuan aset tetap. Ketika memutuskan apakah suatu aset harus diklasifikasikan sebagai kelompok aset tetap, pertimbangan diberikan pada apakah aset tersebut berwujud, memiliki masa manfaat paling sedikit 12 (dua belas) bulan, dibeli dengan maksud untuk digunakan daripada dijual, dan memenuhi persyaratan lainnya.

#### **Perolehan Aset tetap**

Beberapa metode ada untuk memperoleh aset tetap, termasuk:

1. Pembelian secara tunai dan kredit  
Jumlah uang yang dikeluarkan untuk transaksi tersebut, baik yang dilakukan secara tunai maupun kredit, akan menunjukkan apakah aset tetap tersebut dibeli dengan tunai atau tidak. Bukti transaksi seperti kwitansi dan bukti transaksi pendukung lainnya dapat digunakan untuk mendukung perolehan aset tetap melalui pembelian tunai.
2. Pertukaran dengan aset lain  
Dengan menukar dengan aset lain dan mengganti barang yang sudah lama tidak digunakan dengan yang baru, aset tetap dapat diperoleh. Syarat-syarat untuk metode perolehan dengan cara menukarkan dengan harta lain ini, bagaimanapun, termasuk bahwa harta yang akan dipertukarkan tidak boleh dari jenis yang sama dan bahwa nilai pasar dari harta tetap harus diketahui.
3. Hibah (Sumbangan)  
Ada cara lain untuk memperoleh aset tetap, seperti hibah atau yang sering kita sebut sebagai aset donasi. Aset yang diperoleh melalui hibah ini diperoleh tanpa syarat, dan nilainya harus dicatat pada nilai pasar wajar pada saat akuisisi. Cara memperoleh aktiva tetap ini akan sangat berhasil jika disertai dengan perpindahan kepemilikan secara formal.

#### **Penyusutan Aset Tetap**

##### **Pengertian Penyusutan Aset Tetap**

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07, khususnya penyesuaian nilai yang diakibatkan oleh penurunan kemampuan dan keunggulan aset tersebut.

Supami dkk. (2017:146–147) menyebutkan aset tetap tidak digunakan meskipun terdapat gagasan penyusutan, yaitu proses pembebanan harga perolehan yang dibebankan secara rasional dan sistematis selama masa manfaat aset tersebut. Penyusutan adalah distribusi sistematis penyusutan dari semua aset selama masa manfaat ekonomisnya.

Depresiasi, kemudian, adalah penyesuaian nilai yang terkait dengan pengurangan kemampuan dan manfaat aset. Karena aset tetap digunakan dalam operasi pemerintah, manfaatnya terkadang akan berkurang. Akibatnya, nilai aset tetap akan menurun.

### Metode Penyusutan Aset Tetap

Menurut PSAP No.07 metode penyusutan aset tetap dapat dibagi menjadi 3 yaitu :

1. Metode garis lurus

Metode penyusutan yang paling sederhana adalah metode garis lurus, yang dapat diterapkan pada aset tetap yang diharapkan memberikan manfaat yang didistribusikan secara adil selama masa manfaatnya.

<b>Rumus metode garis lurus</b> = $\frac{\text{Nilai Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Masa manfaat}}$
--

2. Metode saldo menurun

Demikian perhitungan metode berdasarkan nilai buku dengan penyusutan garis lurus dua kali. Aset tetap dengan manfaat ekonomi yang menurun dari tahun ke tahun akan lebih diuntungkan dengan menggunakan metode penyusutan ini.

<b>Rumus metode saldo menurun</b> = $\frac{1}{\text{Masa manfaat}} \times 100\% \times 2$
---

3. Metode unit produksi

Berdasarkan hasil estimasi aset tetap yang relevan, metode ini dihitung. Membandingkan nilai yang dapat disusutkan dengan perkiraan output pada kapasitas normal menghasilkan tingkat penyusutan.

<b>Rumus unit produksi</b> = $\frac{(\text{Biaya perolehan} - \text{perkiraan nilai residu})}{\text{Perkiraan masa manfaat}}$
---

### Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.07

#### Pengertian Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.07

Tujuan PSAP 07, sesuatu statment standar yang diterapkan buat seluruh entitas pemerintah yang menyajikan laporan keuangan, merupakan buat mengendalikan seluruh aspek akuntansi aset tetap tercantum pengakuan, evaluasi penyesihan, serta pengungkapan.

#### Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang menginformasikan penelitian ini tercantum berikut:

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian

1.	<b>Christian Morgan moray, Harijanto sabijono, Steven J. T</b>	Analisis Perlakuan Aset Tetap Berdasarkan PSAP Nomor 07 pada Dinas Kesehatan Kota Bitung	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu menggambarkan atau menganalisis data yang berupa tertulis dari lisan atau dari orang-orang yang di amati langsung yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap suatu fenomena atau kenyataan sosial dari objek penelitian.	Bersumber pada perlakuan akuntansi Dinas Kesehatan Kota Belitung pada Riset Permasalahan di Puskesmas Lekas Statment SAP Nomor 07 tentang akuntansi aset tetap bisa disimpulkan kalau pengakuan pengukuran/penilaian, pengeluaran, penyusutan aset yang dihentikan, serta pelepasan serta pengungkapan aset tetap riset permasalahan Dinas Kesehatan Kota Belitung di Puskesmas Lekas cocok dengan statment SAP Nomor 07 tentang akuntansi aset tetap
2.	<b>Alfin Yuli Dianto, Puji Winarko</b>	Analisis perhitungan penyusutan aktiva tetap menurut standar akuntansi keuangan	Metode penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif. Dalam metode ini, analisis dilakukan untuk menghasilkan laporan penelitian yang lebih luas dengan cara menginterpretasikan data yang telah dianalisis dan hasil analisis tersebut dihubungkan dengan teori-teori yang telah ada untuk kemudian baru diambil suatu kesimpulan.	Jenis dan perkiraan umur pakai aset tetap Perum Pegadaian Pusat sudah dikategorikan. Tanah, struktur (gedung perkantoran, bangunan tempat tinggal formal lapangan tenis, pagar kantor, halaman kantor, instalasi kantor), pengelompokan non-bangunan (kendaraan, mesin kantor, pc perabot kantor), serta bangunan yang lagi dibentuk membentuk pengelompokan tersebut. Pasal 11 Undang-Undang No 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Pemasukan jadi bawah kebijakan perhitungan penyusutan Perum Pegadaian Pusat buat segala aset tetap. Buat

				aset tetap kelompok bangunan disusutkan dengan memakai tata cara garis lurus (Straight Line Method), sebaliknya kelompok bukan bangunan disusutkan dengan memakai saldo menyusut ganda (Double Declining Method).
3.	<b>Ahmad Asifuddin, Haris Ihsanil Huda, Zaenal Mustofa</b>	Sistem Informasi Akuntansi Penyusutan Aktiva Tetap Dengan Metode Garis Lurus Pada SMK Muhammadiyah 1 Weleri berbasis Web	Metode penelitian dan pengembangan atau disebut <i>Research &amp; Development</i> digunakan dalam riset yang akan dilakukan dengan metode pengembangan sistem Prototyping untuk menghasilkan produk dalam bentuk Prototype. Sebuah Prototype akan memberikan sebuah gambaran tentang cara kerja sistem yang akan berfungsi dalam bentuk lengkapnya.	Berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari perdebatan yang telah disediakan pada bab-bab sebelumnya. Metode depresiasi aset tetap garis lurus dapat digunakan dengan memanfaatkan sistem informasi akuntansi, yang membantu dalam mengelola aset tetap dan menawarkan informasi yang komprehensif dan akurat tentang nilai aset untuk setiap periode.
4.	<b>Gerry Hasransyah, Set Asmapane, Ferry Diyanti</b>	Analisis perlakuan akuntansi aset tetap dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan	Penyimpulan dari konsep defisinya bahwa definisi operasional menggambarkan variabel yang diteliti yang bersifat kongkrit yang dijelaskan oleh perusahaan atau instansi-instansi yang terkait dalam penelitian	Terdapat selisih nilai buku aset tetap per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 53.218.912 karena perusahaan belum sepenuhnya melaksanakan pencatatan, dan pelaporan aktiva tetap perusahaan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selisih ini mempengaruhi Nilai Buku Aset Tetap dan Laba Ditahan periode 31 Desember 2015 yang meningkatkan nilai aset dan ekuitas PT ASA Sumber Rezeki periode Desember

5	<b>Gabrielle Laurensia Imon, Inggriani Elim, Natalia Y. T. Gerungai</b>	Evaluasi penepatan metode penyusutan aktiva tetap pada PT.Wahana Wirawan Manado-Nissa Datsun Martadinata	Pembahasan permasalahan untuk metode risetnya dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang tujuannya sebagai pengambaran keadaan perusahaan secara akurat, actual maupun sistematis	Aset tetap yang dibeli oleh bisnis dengan uang tunai atau kredit dicatat pada jumlah faktur bersama dengan pengeluaran yang dikeluarkan hingga aset digunakan.
---	---	--	---	--

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2022

## METODE PENELITIAN

### Objek Penelitian

Objek riset ialah tujuan yang ingin dicapai untuk mendapatkan pemecahan dari permasalahan yang terjalin, objek riset ini ialah berbentuk aset tetap pada kantor Sekertariat DPRD Kabupaten Karawang tahun 2021.

### Jenis penelitian

Tipe riset ini memakai riset deskriptif kuantitatif dimana riset ini digunakan untuk menganalisis informasi dengan metode menggambarkan informasi yang sudah di kumpulkan. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui proses perhitungan serta pelaporan penyusutan aset tetap pada kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang.

### Sumber Data dan Data yang Dibutuhkan

Sumber data yaitu objek, benda, dan orang peneliti yang mengamati, bertanya mengenai data, dan membaca. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini terdapat dua, meliputi:

1. Data primer merupakan informasi yang berasal langsung dari objek riset ialah dari Sekertariat DPRD Kabupaten Karawang. Sumber informasi yang digunakan dalam riset ini memakai informasi primer, informasi tersebut ada dalam wujud informasi aset tetap tahun 2021.
2. Data sekunder ialah informasi yang didapatkan secara lengkap dalam wujud jadi, telah dirangkum serta diolah oleh pihak lain serta sudah diterbitkan Informasi sekunder diperoleh dari informasi internal lembaga, sebaliknya informasi eksternal didapatkan dari dokumen, buku harian literatur, PSAP 07 dan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, serta sumber lain yang cocok buat riset ini.

### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan informasi dengan riset ini diperoleh lewat riset lapangan. Riset lapangan dalam riset ini dicoba lewat dokumentasi, ialah dengan informasi yang dikumpulkan dari informasi aset tetap tahun 2021, dan informasi yang lain dalam wujud profil serta ruang lingkup lembaga. Buat memperoleh informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, hingga penulis memakai metode pengumpulan informasi:

1. Riset lapangan, ialah metode pengumpulan informasi serta data dengan metode mengamati perusahaan secara langsung:

a) Observasi

Observasi digunakan selaku metode dini dalam mengamati secara langsung pada industry. Permasalahan yang mencuat pada objek riset dalam keterkaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

b) Dokumentasi

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data-data dengan membuat catatan-catatan dari informasi yang terdapat pada perusahaan yang berkenaan dengan riset ini.

c) Studi Kepustakaan

Tata cara riset kepustakaan dicoba dengan mengumpulkan informasi teoritis tentang permasalahan yang terpaut dengan ulasan pada riset ini. Riset kepustakaan dicoba lewat pendidikan novel buku harian serta riset yang sudah terdapat lebih dahulu terpaut dengan topic ataupun permasalahan yang diteliti. Rujukan pula diperoleh lewat artikel-artikel yang ada pada media online yang didapat secara elektronik lewat internet.

### **Teknik Analisis Data**

#### **Teknik Analisis Data**

Dengan memakai tata cara garis lurus buat memastikan penyusutan aset tetap serta memberi tahu penyusutan aset tetap cocok dengan PSAP 07, tata cara deskriptif kuantitatif ialah metode analisis informasi yang digunakan dalam riset ini.

#### **Mekanisme Penelitian**

Untuk mengidentifikasi topik dan mengusulkan hipotesis kerja dari data, pengumpulan dan analisis data melibatkan pengumpulan dan pengorganisasian data menggunakan kategori, pola, dan deskripsi mendasar. Dalam penelitian kuantitatif, pengumpulan dan analisis data merupakan proses yang berkelanjutan. Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi setelah meneliti masalah, seperti implementasi.

Rumus atau informasi yang sesuai yang terdapat pada landasan teori yang penulis sertakan untuk menghitung penyusutan aset tetap pada Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang ialah metode analisis informasi kuantitatif yang digunakan penulis dalam riset ini. Tata cara garis lurus merupakan tata cara yang digunakan penulis buat menghitung penyusutan aset tetap:

Rumus Metode Garis Lurus:

$$\text{Penyusutan Aset Tetap} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Umur Ekonomis}}$$

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Perusahaan dan Data Penelitian**

#### **Gambaran Umum Perusahaan**

##### **1. Sejarah Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang**

Dengan diberlakukannya Perda No. Hal tersebut tertuang dalam Bab III Pasal 2 Perda No. 1 Tahun 2001. Sebagai hasil dari perda tersebut, dibentuklah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.

Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang dipandu oleh seseorang sekretaris bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD serta secara administratif didukung oleh Sekretaris Daerah tercantum dalam Bab III Pasal 3 beserta peran tugas pokok, guna serta lapisan organisasi, sebaliknya Pasal 4 mencantumkan tugas pokok Sekretariat DPRD, khususnya keuangan DPRD Kabupaten Karawang.

Sedangkan Sekretariat DPRD memiliki lima peran, yaitu sebagai berikut:

1. Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi seluruh aspek pelaksanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang harus dilakukan.
2. Membuat rencana, mengkajinya, dan mengatur koordinasi Pimpinan DPRD Kabupaten Karawang untuk merumuskan kebijakan.
3. Pembekalan DPRD Kabupaten Karawang dan pelaksanaan tugas administrasi, keuangan, dan kepegawaian.
4. Penyiapan agenda dan risalah rapat DPRD Kabupaten Karawang.
5. Menegakkan dan mendorong hukum dan ketertiban.

#### **Visi**

Mewujudkan Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang sebagai lembaga yang kompeten dalam meningkatkan pelayanan dan memajukan penyelenggaraan pemerintahan.

#### **Misi**

Pernyataan yang cukup menunjukkan pentingnya keberadaan Sekretariat Daerah diperlukan dalam rangka mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, khususnya:

1. meningkatkan kinerja lembaga-lembaga di lingkungan pemerintahan yang membentuk kebijakan yang efisien dan komprehensif serta proporsional, transparan, dan akuntabel.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, serta mengelola kegiatan program pembangunan daerah.
3. Meningkatkan standar kepegawaian, infrastruktur, dan keuangan pelayanan aparatur pemerintah.

#### **Tujuan**

Adanya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang jelas dan berwibawa, serta peningkatan arah dan pengendalian program pembangunan ekonomi daerah untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

##### **1. Lokasi Perusahaan atau Lembaga**

Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang berada di Jl. Jendral Ahmad Yani No. 76, Desa Nagasari, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang, Jawa Barat-41314.

##### **2. Bentuk dan Badan Hukum Perusahaan**

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang, yang mengatur tentang susunan dan kedudukan hukum sekretariat.

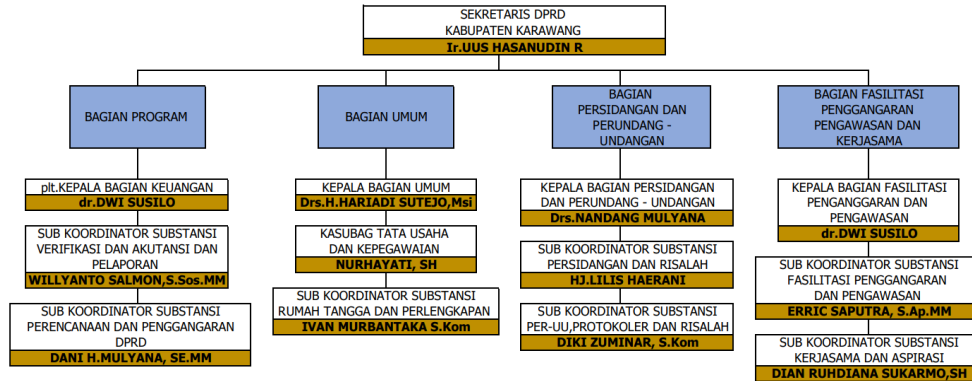
##### **3. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi adalah diagram yang menampilkan bagaimana departemen perusahaan yang berbeda bekerja sama satu sama lain. Atau dengan

kata lain, struktur organisasi adalah diagram yang menggambarkan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh setiap komponen bisnis untuk mencapai tujuannya, atau hubungan antara tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi.

Gambar 4. 1

Struktur Organisasi Sekertariat DPRD Kabupaten Karawang



Sumber: Sekertariat DPRD Kabupatn Karawang

#### 4. Bidang Pekerjaan Mengenai bagan sekertariat DPRD Karawang

##### a. Sekertariat

Tugas utama sekretariat DPRD antara lain mengelola operasional umum sekretariat, risalah rapat, dan keuangan.

##### b. Bagian Umum

Tanggung jawab utama seksi umum adalah mengurus urusan pemerintahan dan urusan DPRD, dan fungsinya meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan, urusan rumah tangga, dan urusan kehumasan. Bagian umum juga membawahi subs berikut:

###### a) Sub Bagian Tata Usaha

Memiliki tanggung jawab utama untuk mengelola masalah administrasi, pengarsipan, dan pembelian.

###### b) Sub Bagian Rumah Tangga

Mempunyai tanggung jawab utama untuk mengatur ruang pertemuan, mengatur perjalanan dinas anggota, mengurus rumah tangga, rumah dinas, gedung DPRD, dan menjamin keamanan ruang kantor DPRD.

###### c) Sub Bagian Humas

Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan hubungan masyarakat.

##### c. Bagian Rapat dan Risalah

Tanggung jawab utama bagian rapat dan risalah adalah pembuatan materi dan risalah rapat:

a) Sub bagian Rapat bertugas merencanakan sidang dan tata ruang serta menyusun daftar dan ringkasan hasil rapat DPRD.

b) Tanggung jawab utama Subbagian Berita Acara adalah mengumpulkan informasi untuk risalah rapat dan menangani tugas-tugas administrasi yang berkaitan dengan penyusutan. Laporan itu juga akan melaporkan rapat paripurna DPRD Kabupaten Karawang tahun 2004 hingga 2009.

**d. Bagian Keuangan**

Tugas utama bawahan bagian keuangan yang antara lain adalah mengelola keuangan dan pembayaran:

- a) Tanggung jawab utama Sub Keuangan meliputi penyiapan anggaran DPRD, pengelolaan sekretariat DPRD, dan pelaporan pelaksanaan.
- b) Tanggung jawab utama subbagian pembayaran adalah menyusun daftar gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada pegawai Sekretariat DPRD, serta daftar honorarium, biaya perkara, dan pembayaran lainnya.

**Data Penelitian**

Tabel 4. 1

Data Harga Perolehan Aset Tetap  
Sekertariat DPRD Kabupaten Karawang

Aset Tetap	Masa Manfaat	Harga Perolehan
PC/Komputer	5 tahun	Rp 13.420.000
Kendaraan Mobil	15 tahun	Rp 516.000.000
Gedung	50 tahun	Rp 5.023.715.250

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2022

Berdasarkan Tabel 4.1 Data Harga Perolehan Aset Tetap Sekerteriat DPRD Kabupaten Karawang, penyusutan dilakukan pada beberapa aset tetap jenis peralatan kantor/PC, kendaraan mobil, dan gedung.

**Hasil Penelitian**

**Penerapan Akuntansi Penyusutan Aset Tetap**

Penerapan Akuntansi Penyusutan Aset Tetap yang dilakukan oleh Sekertariat DPRD Kabupaten Karawang dapat dicirikan sebagai berikut berdasarkan temuan wawancara dengan staf dan kepala sub bidang aset:

- 1. Pengakuan Aset Tetap pada Sekerteriat DPRD Kabupaten Karawang  
Menurut hasil wawancara dengan staf dan kepala sub bidang aset, aset di Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: harus berwujud, memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, memiliki biaya perolehan yang dapat diukur dengan tepat, tidak dijual sebagai bagian dari operasi rutin entitas, dan telah dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Aset Tetap tersebut berupa :
  - a. Peralatan kantor/PC,
  - b. Kendaraan mobil, dan
  - c. Gedung.

- 2. Aktivitas Pencatatan Penyusutan Aset Tetap Sekerteriat DPRD Kabupaten Karawang

Sekerteriat DPRD Kabupaten Karawang melakukan seluruh perlakuan akuntansi penyusutan, dimulai dengan Pemberian Kartu Persediaan Barang. Staf di bidang aset sendiri yang melakukan perhitungan dan pencatatan penyusutan. Sampai dengan pencatatan dan pelaporan penyusutan aset, penyusutan aset tetap

dihitung. Pencatatan perhitungan Penyusutan aset tetap yang terdapat di Sekerteiart DPRD Kabupaten Karawang dilakukan dengan menggunakan sebuah Aplikasi Atisisbada dalam menu (siklus) penyusutan. Berikut adalah gambaran tentang Aplikasi Atisisbada.

Gambar 4. 2  
Aplikasi Atisisbada



Sumber: Sekertariat DPRD Kabupaten Karawang

Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah yang disebut juga Atisisbada adalah sistem informasi manajemen yang digunakan untuk mengelola data dan informasi barang milik daerah secara online.

3. Penentuan Masa Manfaat yang digunakan Sekerteriat DPRD Kabupaten Karawang untuk menghitung tarif penyusutan

Menentukan masa manfaat yang akan digunakan Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang untuk menentukan tarif penyusutan.

Mengingat tabel masa manfaat aset tetap dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 42 Tahun 2019 Lampiran XII mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013, Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang harus mendasarkan masa manfaat yang digunakannya untuk menentukan tarif penyusutan masing-masing kelompok aset tetap pada tabel tersebut.

4. Penentuan Nilai Buku yang dilakukan Sekerteriat DPRD Kabupaten Karawang

Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang menentukan nilai buku. Sesuai ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 42 Tahun 2019 Lampiran XXI, yang menjelaskan tentang Akuntansi Aset Tetap, nilai buku aset tetap dihitung oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang dari harga perolehan aset setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

5. Metode Penyusutan yang di terapkan pada Sekerteriat DPRD Kabupaten Karawang

Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk menghitung penyusutan dengan mudah, karena metode ini

dianggap paling sederhana dalam menentukan besarnya biaya penyusutan, akumulasi penyusutan sampai dengan total nilai buku setiap aset tetap, kecuali aset tetap tanah. Staf lapangan aset mengklaim bahwa karena tanah adalah aset tetap yang nilainya akan meningkat setiap tahun dan memiliki masa manfaat yang tidak terbatas, tanah tidak dianggap sebagai aset yang dapat didepresiasi. Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang melakukan penyusutan aset tetap mulai tahun perolehan dengan nilai sisa pada akhir periode. Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan pada setiap akhir periode, dimulai dari 0,00 (nol rupiah).

### Pembahasan

#### Penerapan Perhitungan Penyusutan Aset tetap pada Sekerteriat DPRD Kabupaten Karawang

Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang menggunakan akuntansi penyusutan aset tetap yang diawali dengan pengakuan aset tetap. Instansi yang melakukan perhitungan penyusutan aktiva tetap, menentukan masa manfaat aktiva tetap, menentukan nilai buku aktiva tetap, dan menerapkan metode penyusutan yang digunakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang dalam menghitung besarnya penyusutan aktiva tetap adalah dengan menggunakan metode garis lurus. Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang menggunakan metode garis lurus dalam perhitungan penyusutan di bawah ini:

##### 1. Peralatan Kantor/PC

Pada tanggal 26 Desember 2019, Sekerteriat DPRD Kabupaten Karawang membeli satu unit PC dengan harga yang diperoleh sebesar Rp. 13.420.000, PC tersebut diperkirakan memiliki masa manfaat 5 (tahun) tanpa nilai residu (0,00). Maka perhitungan penyusutan yang dilakukan oleh Sekerteriat DPRD Kabupaten Karawang dengan Metode Garis Lurus yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rumus} &= \frac{HP-NR}{UE} \\ &= \frac{Rp.13.420.000 - Rp 0.00}{5} \\ &= \text{Rp. 2.684.000} \end{aligned}$$

Tabel 4. 2  
Penyusutan PC/Komputer

Tahun	Perhitungan Beban	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Rp 13.420.000
<b>2019</b>	12/12 × 2.684.000	Rp 2.684.000	Rp 2.684.000	Rp 10.736.000
<b>2020</b>	12/12 × 2.684.000	Rp 2.684.000	Rp 5.368.000	Rp 8.052.000
<b>2021</b>	<b>12/12 × 2.684.000</b>	<b>Rp 2.684.000</b>	<b>Rp 8.052.000</b>	<b>Rp 5.368.000</b>
<b>2022</b>	12/12 × 2.684.000	Rp 2.684.000	Rp 10.736.000	Rp 2.684.000
<b>2023</b>	12/12 × 2.684.000	Rp 2.684.000	Rp 13.420.000	Rp -

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2022

Berdasarkan perhitungan penyusutan di atas, bahwa di Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 beban penyusutan nilainya sama sebesar Rp.2.684.000. Untuk akumulasi penyusutan dari tahun 2019-2021 akan terus bertambah dan akan

mengalami penurunan pada nilai buku dari tahun 2019 – 2021 sebesar Rp.5.368.000.

Namun, jika dilakukan perhitungan sampai masa manfaat komputer/PC tersebut habis pada tahun terakhir ( Tahun 2023) untuk nilai bukunya habis atau Rp. 0.

## 2. Kendaraan Mobil

Pada tanggal 31 Desember 2019 Sekerteriat DPRD Kabupaten Karawang memperoleh aset tetap kendaraan mobil dengan harga perolehan sebesar Rp.516.000.000 mempunyai masa manfaat selama 15 tahun dengan nilai residu nol (Rp 0.00), maka perhitungan penyusutan yang dilakukan oleh Sekerteriat DPRD Kabupaten Karawang dengan menggunakan metode garis lurus yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Rumus} &= \frac{HP-NR}{UE} \\ &= \frac{Rp.516.000.000-Rp\ 0,00}{15} \\ &= Rp.34.400.000 \end{aligned}$$

Tabel 4. 3  
Penyusutan Kendaraan Mobil

Tahun	Perhitungan Beban	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Rp 516.000.000
<b>2019</b>	12/12 × 34.400.000	Rp 34.400.000	Rp 34.400.000	Rp 481.600.000
<b>2020</b>	12/12 × 34.400.000	Rp 34.400.000	Rp 68.800.000	Rp 447.200.000
<b>2021</b>	<b>12/12 × 34.400.000</b>	<b>Rp 34.400.000</b>	<b>Rp 103.200.000</b>	<b>Rp 412.800.000</b>
<b>2022</b>	12/12 × 34.400.000	Rp 34.400.000	Rp 137.600.000	Rp 378.400.000
<b>2023</b>	12/12 × 34.400.000	Rp 34.400.000	Rp 172.000.000	Rp 344.000.000
<b>2024</b>	12/12 × 34.400.000	Rp 34.400.000	Rp 206.400.000	Rp 309.600.000
<b>2025</b>	12/12 × 34.400.000	Rp 34.400.000	Rp 240.800.000	Rp 275.200.000
<b>2026</b>	12/12 × 34.400.000	Rp 34.400.000	Rp 275.200.000	Rp 240.800.000
<b>2027</b>	12/12 × 34.400.000	Rp 34.400.000	Rp 309.600.000	Rp 206.400.000
<b>2028</b>	12/12 × 34.400.000	Rp 34.400.000	Rp 344.000.000	Rp 172.000.000
<b>2029</b>	12/12 × 34.400.000	Rp 34.400.000	Rp 378.400.000	Rp 137.600.000
<b>2030</b>	12/12 × 34.400.000	Rp 34.400.000	Rp 412.800.000	Rp 103.200.000
<b>2031</b>	12/12 × 34.400.000	Rp 34.400.000	Rp 447.200.000	Rp 68.800.000
<b>2032</b>	12/12 × 34.400.000	Rp 34.400.000	Rp 481.600.000	Rp 34.400.000
<b>2033</b>	12/12 × 34.400.000	Rp 34.400.000	Rp 516.000.000	Rp -

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2022

Berdasarkan perhitungan penyusutan di atas, bahwa di Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 beban penyusutan nilainya sama sebesar Rp.34.400.000. Untuk akumulasi penyusutan dari tahun 2019-2021 akan terus bertambah dan akan mengalami penurunan pada nilai buku dari tahun 2019 – 2021 sebesar Rp.412.800.000.

Namun, jika dilakukan perhitungan sampai masa manfaat kendaraan mobil tersebut habis pada tahun terakhir ( Tahun 2033) untuk nilai bukunya habis atau Rp. 0.

3. Gedung

Pada bulan 31 Desember 2018 Sekerteriat DPRD Kabupaten Karawang memperoleh aset tetap gedung dengan harga perolehan sebesar Rp.5.023.715.250 mempunyai masa manfaat selama 50 tahun dengan nilai residu nol (Rp 0.00). maka perhitungan penyusutan yang dilakukan oleh Sekerteriat DPRD Kabupaten Karawang dengan menggunakan metode garis lurus yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Rumus} &= \frac{HP-NR}{UE} \\ &= \frac{Rp.5.023.715.250-Rp 0,00}{50} \\ &= Rp.100.474.305 \end{aligned}$$

Tabel 4. 4  
Penyusutan Gedung

Tahun	Perhitungan Beban	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Rp 5.023.715.250
2018	12/12 × 100.474.305	Rp 100.474.305	Rp 100.474.305	Rp 4.923.240.945
2019	12/12 × 100.474.305	Rp 100.474.305	Rp 200.948.610	Rp 4.822.766.640
2020	12/12 × 100.474.305	Rp 100.474.305	Rp 301.422.915	Rp 4.722.292.335
2021	<b>12/12 × 100.474.305</b>	Rp 100.474.305	<b>Rp 401.897.220</b>	<b>Rp 4.621.818.030</b>
2022	12/12 × 100.474.305	Rp 100.474.305	Rp 502.371.525	Rp 4.521.343.725
2023	12/12 × 100.474.305	Rp 100.474.305	Rp 602.845.830	Rp 4.420.869.420
2024	12/12 × 100.474.305	Rp 100.474.305	Rp 703.320.135	Rp 4.320.395.115
2025	12/12 × 100.474.305	Rp 100.474.305	Rp 803.794.440	Rp 4.219.920.810
2026	12/12 × 100.474.305	Rp 100.474.305	Rp 904.268.745	Rp 4.119.446.505
2027	12/12 × 100.474.305	Rp 100.474.305	Rp 1.004.743.050	Rp 4.018.972.200
2028	12/12 × 100.474.305	Rp 100.474.305	Rp 1.105.217.355	Rp 3.918.497.895
2029	12/12 × 100.474.305	Rp 100.474.305	Rp 1.205.691.660	Rp 3.818.023.590
2030	12/12 × 100.474.305	Rp 100.474.305	Rp 1.306.165.965	Rp 3.717.549.285
2031	12/12 × 100.474.305	Rp 100.474.305	Rp 1.406.640.270	Rp 3.617.074.980
2032	12/12 × 100.474.305	Rp 100.474.305	Rp 1.507.114.575	Rp 3.516.600.675
2033	12/12 × 100.474.305	Rp 100.474.305	Rp 1.607.588.880	Rp 3.416.126.370
2034	12/12 × 100.474.305	Rp 100.474.305	Rp 1.708.063.185	Rp 3.315.652.065
2035	12/12 × 100.474.305	Rp 100.474.305	Rp 1.808.537.490	Rp 3.215.177.760
2036	12/12 × 100.474.305	Rp 100.474.305	Rp 1.909.011.795	Rp 3.114.703.455
2037	12/12 × 100.474.305	Rp 100.474.305	Rp 2.009.486.100	Rp 3.014.229.150
2038	12/12 × 100.474.305	Rp 100.474.305	Rp 2.109.960.405	Rp 2.913.754.845
2039	12/12 × 100.474.305	Rp 100.474.305	Rp 2.210.434.710	Rp 2.813.280.540

2040	12/12 × 100.474.305	Rp 100.474.305	Rp 2.310.909.015	Rp 2.712.806.235
2041	12/12 × 100.474.305	Rp 100.474.305	Rp 2.411.383.320	Rp 2.612.331.930
2042	12/12 × 100.474.305	Rp 100.474.305	Rp 2.511.857.625	Rp 2.511.857.625
2043	12/12 × 100.474.305	Rp 100.474.305	Rp 2.612.331.930	Rp 2.411.383.320
2044	12/12 × 100.474.305	Rp 100.474.305	Rp 2.712.806.235	Rp 2.310.909.015
2045	12/12 × 100.474.305	Rp 100.474.305	Rp 2.813.280.540	Rp 2.210.434.710
2046	12/12 × 100.474.305	Rp 100.474.305	Rp 2.913.754.845	Rp 2.109.960.405
2047	12/12 × 100.474.305	Rp 100.474.305	Rp 3.014.229.150	Rp 2.009.486.100
2048	12/12 × 100.474.305	Rp 100.474.305	Rp 3.114.703.455	Rp 1.909.011.795
2049	12/12 × 100.474.305	Rp 100.474.305	Rp 3.215.177.760	Rp 1.808.537.490
2050	12/12 × 100.474.305	Rp 100.474.305	Rp 3.315.652.065	Rp 1.708.063.185
2051	12/12 × 100.474.305	Rp 100.474.305	Rp 3.416.126.370	Rp 1.607.588.880
2052	12/12 × 100.474.305	Rp 100.474.305	Rp 3.516.600.675	Rp 1.507.114.575
2053	12/12 × 100.474.305	Rp 100.474.305	Rp 3.617.074.980	Rp 1.406.640.270
2054	12/12 × 100.474.305	Rp 100.474.305	Rp 3.717.549.285	Rp 1.306.165.965
2055	12/12 × 100.474.305	Rp 100.474.305	Rp 3.818.023.590	Rp 1.205.691.660
2056	12/12 × 100.474.305	Rp 100.474.305	Rp 3.918.497.895	Rp 1.105.217.355
2057	12/12 × 100.474.305	Rp 100.474.305	Rp 4.018.972.200	Rp 1.004.743.050
2058	12/12 × 100.474.305	Rp 100.474.305	Rp 4.119.446.505	Rp 904.268.745
2059	12/12 × 100.474.305	Rp 100.474.305	Rp 4.219.920.810	Rp 803.794.440
2060	12/12 × 100.474.305	Rp 100.474.305	Rp 4.320.395.115	Rp 703.320.135
2061	12/12 × 100.474.305	Rp 100.474.305	Rp 4.420.869.420	Rp 602.845.830
2062	12/12 × 100.474.305	Rp 100.474.305	Rp 4.521.343.725	Rp 502.371.525
2063	12/12 × 100.474.305	Rp 100.474.305	Rp 4.621.818.030	Rp 401.897.220
2064	12/12 × 100.474.305	Rp 100.474.305	Rp 4.722.292.335	Rp 301.422.915
2065	12/12 × 100.474.305	Rp 100.474.305	Rp 4.822.766.640	Rp 200.948.610
2066	12/12 × 100.474.305	Rp 100.474.305	Rp 4.923.240.945	Rp 100.474.305
2067	12/12 × 100.474.305	Rp 100.474.305	Rp 5.023.715.250	Rp -

*Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2022*

Berdasarkan perhitungan penyusutan di atas, bahwa di Tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 beban penyusutan nilainya sama sebesar Rp.100.474.305. Untuk akumulasi penyusutan dari tahun 2018-2021 akan terus bertambah dan akan mengalami penurunan pada nilai buku dari tahun 2018 – 2021 sebesar Rp.4.621.818.030.

Namun, jika dilakukan perhitungan sampai masa manfaat gedung tersebut habis pada tahun terakhir ( Tahun 2067) untuk nilai bukunya habis atau Rp. 0.

### Perbandingan antara Penerapan Penyusutan Aset Tetap yang Dilakukan Sekerteriat DPRD Kabupaten Karawang dengan PSAP 07

Berikut adalah penjelasan mengenai kesesuaian antara Penerapan Penyusutan Aset Tetap yang dilakukan oleh Sekertriat DPRD Kabupaten karawang dengan PSAP 07 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 5

*Perbandingan Penerapan Penyusutan Aset Tetap*

<b>Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang</b>	<b>PSAP 07</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Pengakuan Aset Tetap Sekerteriat DPRD Kabupaten Karawang mengakui aset tetap dengan syarat memiliki umur ekonomis yang lebih dari 12 bulan, aset tetap tersebut berwujud, diperoleh atau dibangun dengan tujuan untuk digunakan dan tidak untuk dijual demi kepentingan pribadi.</b>	<b>Pengakuan Aset Tetap</b> Menurut ketentuan yang terdapat dalam PSAP 07, pengakuan aset tetap dapat diukur secara handal apabila telah memenuhi beberapa kriteria yaitu: Berwujud, Memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan,diperoleh dengan maksud digunakan,dan tidak untuk dijual demi kepeningan entitas.	<b>Sesuai</b>
<b>Penentuan Masa Manfaat</b> Cara penentuan masa manfaat aset tetap pada Sekerteriat DPRD Kabupaten Karawang yaitu dengan cara melihat tabel masa manfaat yang telah ditentukan di dalam Peraturan Bupati Karawang No 42 Tahun 2019. Isi dalam tabel Peraturan Bupati Karawang ini sama dengan isi Tabel masa manfaat aset tetap yang ada dalam Peraturan Menteri Keuangan No 59/KMK.6/2013	<b>Penentuan Masa Manfaat</b> Dalam menentukan masa manfaat terhadap aset tetap entitas dapat mengacu pada tabel masa manfaat pada peraturan menteri keuangan nomor 59/KMK.6/2013	<b>Sesuai</b>
<b>Penentuan Nilai Buku</b> Dalam menentukan nilai buku dalam setiap periode, Sekerteriat DPRD Kab Karawang melakukan perhitungan dengan cara harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan pada masing masing tahun.	<b>Penentuan Nilai Buku</b> Dalam pernyataan yang terdapat pada PSAP 07 yaitu untuk mnghitung nilai buku suatu aset dengan cara harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.	<b>Sesuai</b>
<b>Metode Penyusutan</b> Sekerteriat DPRD kabupaten karawang menghitung besarnya penyusutan dengan metode penyusutan garis lurus, karna metode ini dianggap sebagai	<b>Metode Penyusutan</b> Dalam PSAP 07 metode penyusutan yang boleh digunakan yaitu metode garis lurus, saldo menurun ganda dan metode unit produksi.	<b>Sesuai</b>

metode yang paling sederhana dan cukup mudah untuk digunakan.		
---	--	--

Sumber : Hasil Analisis Data, 2022

Semua entitas pemerintah wajib menghitung penyusutan aset tetap sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah, khususnya aturan yang mengatur tata cara penerapan penyusutan aset tetap sebagaimana diatur dalam PSAP 07. Berdasarkan Tabel 4.5 terlihat Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang telah menerapkan akuntansi penyusutan aset tetap, dimulai dari pengakuan aset tetap, penentuan masa manfaat aset tetap, penentuan nilai buku aset tetap, dan dilanjutkan dengan metode penyusutan yang digunakan sesuai dengan aturan yang tercantum pada PSAP 07.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan mengenai perhitungan dan pelaporan penyusutan aset tetap pada Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang 2021 menggunakan metode garis lurus dan acuan pada PSAP 07 adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan penyusutan aset tetap yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang yang mengacu pada Peraturan Bupati Karawang No.42 Tahun 2019 bahwa penerapan perhitungan penyusutan yang dimulai dari pengakuan aset tetap, penentuan masa manfaat suatu aset tetap, penentuan nilai buku suatu aset sampai dengan penggunaan metode penyusutan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang dilakukan dengan metode Garis Lurus.
2. Pelaporan penyusutan aset tetap pada Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang mengacu pada Peraturan Bupati Karawang No.42 Tahun 2019 dengan PSAP 07 dapat dilihat dari perbandingan yang di sajikan pada Tabel 4.4, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pelaporan akuntansi penyusutan aset tetap yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang telah sesuai dengan pernyataan yang diatur dalam PSAP 07.

### **Saran**

Penulis membuat rekomendasi berikut berdasarkan analisis data dari studi mereka tentang perhitungan dan pelaporan penyusutan aset tetap:

1. Penggunaan akuntansi penyusutan aset tetap yang telah diselesaikan dengan baik dan benar serta tidak menyimpang dari aturan yang telah digariskan dalam PSAP 07 harus dipelihara oleh instansi pemerintah khususnya Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang.
2. Aset dan hal-hal lain yang relevan harus selalu dievaluasi oleh organisasi pemerintah, khususnya Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang, agar tetap terjaga dan terorganisir untuk semua kegiatan operasional ke depan

**DAFTAR PUSTAKA**

**Dwi cahya R.S, Y. E. (2020). Penerapan aset Tetap Berdasarkan SAP 07 Pada DPUPR Kabupaten Situbondo.**

Ely, S. (2019). *Akuntansi Keuangan*. Bandung.

Faneisya Pesak, H. S. (2018). *Analisis Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Perpajakan Pada CV. Samiah Sejahtera.*

Faneisya Pesak, H. S. (2018). *Analisis Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut Standar akuntansi Keuangan dan Perpajakan Pada CV.Samiah Sejahtera.*

Hanggara, Agie. (2019). *Pengantar Akuntansi*. Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya.

Hasanah, Nurmalia., & Fauzi, Achmad. (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor: In Media.

Pramudiana, Agatha Ame. (2017). *Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Organisasi Sektor Publik*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Sahril Rumbu, I. E. (2018). *Penerapan Akuntansi Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara.*

Sugiri, Slamet., & Riyono, Bogat Agus. (2018). *Akuntansi: Pengantar 1*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Sumarsan, Thomas. (2018). *Akuntansi Dasar dan Aplikasi dalam Bisnis Versi IFRS*. Jakarta: Indeks.

Waluyo. (2020). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.